



Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Masjid Agung Banten sebagai Warisan Sejarah Islam Nusantara

Angeli Ramadhani^{1*}, Nadia Khumairatun Nisa², Amealiea Prihatinningsih Malandy's³,
Ria Amelia⁴, Azalia Salsabila⁵, Siti Alya Aryanti⁶, Syifa Aulia Ramadhani⁷

¹⁻⁷ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
Email: angeliramadhani01@gmail.com¹, nadia.khumairatun@untirta.ac.id², aprihatinningsih565@gmail.com³,
ria.ameliaaa08@gmail.com⁴, azaliasalsabila812@gmail.com⁵, s.alia.aryanti@gmail.com⁶,
syifaauliaramadhani238@gmail.com⁷

* Penulis Korespondensi: angeliramadhani01@gmail.com

Abstract. *The Great Mosque of Banten is a historical heritage that reflects cultural acculturation and the glory of Islam in the Indonesian archipelago. This study aims to analyze the forms of collaboration between the government, local communities, and site managers in preserving the Great Mosque of Banten using the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash (2007). A descriptive qualitative approach was applied through interviews, field observations, and document studies conducted in the Great Mosque area. The findings reveal that collaboration among stakeholders has not yet reached optimal levels due to limited communication, trust gaps, and conflicting interests. Nevertheless, functional cooperation has emerged through joint activities in sanitation, security, and tour guide training. Based on the five indicators of the collaborative process, direct communication (face to face dialogue) and trust building remain major challenges, while shared understanding between government agencies, the foundation, and the community has begun to develop. This study highlights the importance of sustainable collaborative governance in preserving the religious, historical, and social values of the Great Mosque of Banten while supporting the welfare of the surrounding community.*

Keywords: *Collaborative Governance; Community Collaboration; Cultural Heritage Preservation; Government; Great Mosque of Banten.*

Abstrak. Masjid Agung Banten merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang mencerminkan akulturasi budaya dan kejayaan Islam di Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola dalam pelestarian Masjid Agung Banten menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007). Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di kawasan Masjid Agung Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor belum berjalan optimal karena masih adanya keterbatasan komunikasi, kesenjangan kepercayaan, dan perbedaan kepentingan. Namun, telah muncul bentuk kerja sama yang bersifat fungsional melalui kegiatan kebersihan, keamanan, dan pelatihan pemanduan wisata. Lima indikator *collaborative process* menunjukkan bahwa komunikasi langsung (*face to face dialogue*) dan pembangunan kepercayaan (*trust building*) menjadi tantangan utama, sementara pemahaman bersama (*shared understanding*) mulai terbentuk antara pemerintah, yayasan, dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan untuk menjaga nilai religius, historis, dan sosial Masjid Agung Banten sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal.

Kata Kunci: *Collaborative Governance; Kolaborasi Pemerintah; Masjid Agung Banten; Masyarakat; Pelestarian Warisan Budaya.*

1. LATAR BELAKANG

Masjid Agung Banten merupakan peninggalan bersejarah yang memiliki makna penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Dibangun pada tahun 1566 M oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, masjid ini berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus simbol kejayaan Kesultanan Banten. Arsitekturnya memperlihatkan perpaduan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang menunjukkan terjadinya akulturasi budaya serta memperkuat identitas Banten sebagai salah satu pusat dakwah Islam di Indonesia (Kompas, 2021;

Kemdikbud, 2024). Kini, Masjid Agung Banten menjadi destinasi wisata religi yang mempertemukan kepentingan spiritual, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitar.

Pelestarian Masjid Agung Banten menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi fisik bangunan maupun tata kelola kawasan. Kondisi bangunan yang telah berusia lebih dari empat abad menuntut perawatan berkelanjutan dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Selain itu, ketegangan antara kepentingan pembangunan modern dan pelestarian nilai historis kerap menimbulkan dilema kebijakan antara pemerintah daerah, pelaku wisata, dan masyarakat lokal (Fadillah, 2023).

Penelitian terdahulu menyoroti pentingnya sinergi multipihak dalam menjaga kawasan bersejarah Banten Lama. Amrulloh et al. (2022) dalam kajiannya tentang *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Daerah Banten Lama* menemukan bahwa koordinasi antarinstansi pemerintah dan masyarakat belum berjalan optimal akibat tumpang tindih kewenangan dan belum adanya badan pengelola khusus. Iqbal dan Hikmawan (2023) menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* mampu meningkatkan efektivitas konservasi hutan mangrove di Kota Serang melalui partisipasi lintas aktor. Penelitian Raharjo (2024) tentang pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan juga menekankan bahwa keberhasilan pelestarian budaya sangat dipengaruhi oleh komitmen bersama antaraktor yang terlibat.

Lestari et al. (2021) menegaskan bahwa revitalisasi kawasan Banten Lama memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, sedangkan Pakhudin, Arenawati, dan Stiawati (2022) mencatat masih lemahnya pelaksanaan kebijakan pariwisata akibat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta kurangnya kolaborasi antaraktor. Kajian-kajian tersebut menyoroti pentingnya koordinasi dalam pengelolaan kawasan, namun belum secara spesifik menelaah bagaimana proses kolaboratif berlangsung dalam pelestarian situs religius seperti Masjid Agung Banten yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan historis tinggi.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007). Teori ini menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan bentuk kerja sama antara lembaga pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan formal yang berorientasi pada konsensus. Kolaborasi ini tidak muncul secara spontan, melainkan hasil dari upaya berbagai pihak untuk memperkenalkan koordinasi dan kemitraan dalam menangani masalah publik (Ansell & Gash, 2008; Bila & Saputra, 2019). Dalam konteks administrasi

publik modern, kolaborasi menjadi penting untuk mengatasi kompleksitas kebijakan dan keterbatasan birokrasi (Maulana & Ariesmansyah, 2024).

Penelitian ini menitikberatkan pada salah satu elemen utama dari teori Ansell dan Gash (2007), yaitu *collaborative process*, yang menggambarkan dinamika utama dalam proses kolaborasi. Elemen ini terdiri atas lima indikator utama yang saling berkaitan: *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes* (Ariesmansyah et al., 2023). *Face to face dialogue* menekankan pentingnya komunikasi langsung antaraktor untuk mencapai kesepahaman tujuan bersama, sedangkan *trust building* menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan untuk memperkuat kerja sama (Dwiyanto, 2011). *Commitment to the process* dan *shared understanding* menggambarkan kesediaan para aktor menjaga konsistensi dan kesamaan pandangan terhadap tujuan kolaborasi (Cahyani et al., 2024). Adapun *intermediate outcomes* menandai keberhasilan kolaborasi melalui pencapaian kecil yang memperkuat semangat dan rasa saling percaya antaraktor.

Teori ini relevan digunakan dalam konteks pelestarian Masjid Agung Banten karena proses perawatan dan pengelolaan situs religius tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola kawasan, tokoh agama, hingga masyarakat sekitar. Melalui pendekatan *Collaborative Governance*, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana pola kerja sama antaraktor terbentuk, faktor yang mendukung atau menghambat proses kolaboratif, serta sejauh mana kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan nilai religius, sosial, dan budaya Masjid Agung Banten.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian Masjid Agung Banten, menganalisis dinamika proses kolaboratif yang terjadi, serta mengidentifikasi hasil sementara (*intermediate outcomes*) yang muncul dari kerja sama tersebut sebagai dasar penguatan tata kelola pelestarian warisan Islam di Banten.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi antar-aktor dalam pelestarian Masjid Agung Banten sebagai warisan budaya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual dan memberikan ruang bagi interpretasi makna dari pengalaman para pelaku yang terlibat. Lokasi penelitian berada di Kawasan Masjid Agung Banten, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Kasemen, Kota Serang,

Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu situs warisan budaya tertua di Indonesia yang masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus destinasi wisata religi, sehingga memiliki kompleksitas tinggi dalam pengelolaan dan pelestariannya.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam kegiatan pelestarian. Informan terdiri atas unsur pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, pengelola situs, tokoh masyarakat, dan pengunjung atau peziarah. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik jenuh (*data saturation*).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan, pengalaman, serta bentuk kolaborasi yang dijalankan oleh setiap aktor. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik situs, aktivitas pelestarian, serta interaksi sosial yang terjadi di lapangan. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup penelusuran dokumen resmi, peraturan daerah, arsip kebijakan, dan literatur akademik terkait pelestarian warisan budaya di Banten.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian untuk memastikan keabsahan dan konsistensi hasil temuan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan cara membandingkan hasil wawancara dari berbagai aktor, mengamati kesesuaian dengan kondisi faktual di lapangan, serta mencocokkan dengan dokumen resmi. Langkah ini dilakukan guna menjaga validitas temuan dan meningkatkan kredibilitas interpretasi hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kolaborasi dalam Pelestarian Masjid Agung Banten

Kolaborasi dalam tata kelola publik berarti kerja sama antara pihak-pihak dengan kepentingan berbeda yang diarahkan pada tujuan bersama. Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa kolaborasi menuntut dialog, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama untuk mencapai hasil kolektif. Dalam konteks pelestarian cagar budaya, kolaborasi diperlukan agar pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku ekonomi dapat menjaga keseimbangan antara nilai sejarah dan aktivitas sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian Masjid Agung Banten tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, pengurus masjid, serta masyarakat lokal. Kolaborasi yang terjalin berorientasi pada upaya menjaga nilai historis dan

religius situs tersebut, sekaligus mengelolanya sebagai destinasi wisata budaya dan religi yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dominan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan pelestarian, sementara masyarakat terlibat dalam kegiatan perawatan rutin, pengawasan lingkungan, serta penyediaan jasa ekonomi lokal di sekitar kawasan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, koordinasi antaraktor ini sudah berjalan namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan kepentingan ekonomi dan budaya, serta belum optimalnya sistem komunikasi antar lembaga. Untuk memahami dinamika tersebut, analisis berikut disusun berdasarkan lima indikator teori *Collaborative Process* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007).

Disparpora Kota Serang bertanggung jawab atas pengembangan dan revitalisasi wisata religi. Upayanya meliputi perbaikan infrastruktur, penataan area perdagangan, penyediaan fasilitas umum, dan koordinasi dengan pengelola masjid untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan pengunjung. Status Warisan Cagar Budaya Nasional yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 menjadi dasar kerja sama lintas instansi dan dukungan anggaran daerah (Antara News, 2019).

Pedagang di sekitar kawasan berperan dalam menjaga dinamika sosial ekonomi. Aktivitas perdagangan menopang kehidupan masyarakat lokal sekaligus memperkuat daya tarik wisata religi. Hubungan pedagang dan pemerintah tercermin dalam kegiatan penataan kawasan, pengaturan zonasi, dan keterlibatan warga dalam kegiatan sosial-keagamaan. Fadillah (2022) menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi kawasan bersejarah bergantung pada partisipasi sosial masyarakat lokal. Pelestarian yang hanya berfokus pada aspek fisik tanpa mempertimbangkan dimensi sosial berpotensi menimbulkan resistensi warga. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dan pedagang di kawasan Masjid Agung Banten merupakan wujud pelestarian berbasis kolaborasi.

Analisa Berdasarkan Teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2007)

Face to Face Dialogue

Tahapan Face to Face Dialogue dalam teori Collaborative Governance menjadi dasar penting dalam membangun interaksi langsung antaraktor yang berkolaborasi. Melalui komunikasi tatap muka, setiap pihak dapat saling memahami kepentingan dan posisi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama (Gunawan & Ma'ruf Farid, 2020). Dalam konteks pelestarian Masjid Agung Banten sebagai warisan sejarah Islam Nusantara, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat lokal belum sepenuhnya terjalin secara efektif.

Masjid Agung Banten bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol identitas kultural masyarakat Banten yang memadukan nilai religius, sosial, dan historis. Masjid ini berdiri sejak masa Kesultanan Banten pada abad ke-16 dan menjadi pusat penyebaran Islam serta aktivitas sosial keagamaan (Irvansetiawan, 2018). Kini, kawasan tersebut juga berfungsi sebagai destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Namun, berdasarkan hasil wawancara lapangan, pelibatan langsung pemerintah dalam komunikasi dua arah masih minim. Salah satu pedagang menyampaikan *“Saya dagang udah dari lama sampe anak saya sekarang udah kelas 6 SD, cuman saya jarang pernah lihat pemerintah berkunjung kesini sih. Malahan adanya tuh orang gede atau orang berada gitu terus biasanya pedagang tuh disuruh minggir, ga boleh jualan”* (Wawancara, 9 Oktober 2025).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat belum membentuk ruang dialog yang partisipatif. Keterbatasan komunikasi langsung berpotensi memunculkan kesalahpahaman dalam kebijakan pelestarian, terutama ketika pemerintah menekankan aspek fisik bangunan tanpa memperhatikan nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat setempat. Padahal, partisipasi masyarakat sebagai penjaga nilai-nilai kultural sangat menentukan keberhasilan pelestarian jangka panjang. Dalam kerangka collaborative governance, komunikasi yang setara memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama dan rasa memiliki terhadap proses pelestarian (Ansell & Gash, 2007).

Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Agung Banten juga berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Kegiatan seperti pengajian, doa ziarah, dan perayaan hari besar Islam sering dilakukan di kawasan ini. Namun, beberapa kebijakan pengaturan yang dilakukan aparat pemerintah pada hari-hari besar seringkali menimbulkan ketegangan. Salah seorang pedagang mengungkapkan *“Kadang emang suka diusir aja, apalagi pas lebaran tuh juga diusirin. Satgas nya keliling kalo di hari rame aja. Terus kalo penjaga kotak amal mah ga diusirin, palingan pedagang yang diusirin”* (Wawancara, 9 Oktober 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi dan dialog antara pihak pengelola dengan masyarakat sekitar belum optimal. Padahal, komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan menjadi pondasi kolaborasi yang sehat untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga keseimbangan antara fungsi religius, ekonomi, dan kultural kawasan.

Collaborative governance dalam hal untuk pelestarian masjid agung Banten Lama juga sebenarnya tidak sepenuhnya berjalan secara langsung berinteraksi antar pemerintah dengan yayasan pengelola masjid. Mereka melestarikan peninggalan sejarah berupa bangunan itu dengan cara mereka masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh yayasan pengelola pelestarian masjid agung Banten Lama tersebut yakni *“untuk pengelolaan pelestarian masing-masing*

gitu, pemerintah mengelola pelestariannya pada kebersihan, ketertiban serta keamanan oleh pemkot Serang, namun jika dari pihak kesultanan juga ada keamanannya. Jadi untuk pengelolaannya masing-masing, masing-masing aturan dan kebijakan.. jadi insyaallah saling bekerja sama” Wawancara 27 Oktober, 2025.

Mengenai pelestarian Masjid Agung Banten Lama, tulisan ini melibatkan Disparpora Kota Serang sebagai narasumber. Dari hasil wawancara kepada Disparpora Kota Serang, kolaborasi antara Disparpora dengan masyarakat serta yayasan pengelola Masjid Agung Banten Lama sebenarnya tidak ada. Karena Disparpora tidak mempunyai wewenang untuk mengatur di wilayah Banten Lama tersebut. Akan tetapi, Disparpora memiliki KPW atau Kampung Wisata di daerah Kasemen. Pada tahun ini, KPW akan mengadakan kolaborasi dengan kenadziran yayasan Masjid Agung Banten Lama. Bentuk kolaborasi ini hanya sekedar mengajak bekerja sama pada yayasan. Kerja sama tersebut dilakukan secara komunikasi langsung dengan yayasan maupun masyarakat sekitar Banten Lama. Oleh karena itu, hal tersebut sesuai dalam indikator *face to face dialogue* yang berarti adanya komunikasi secara langsung maupun tidak langsung antara pihak satu dan pihak lainnya.

Trust Building dalam Pengelolaan Kawasan Masjid Agung Banten

Keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada dialog, tetapi juga pada kepercayaan antaraktor (*trust building*). Masjid Agung Banten merupakan warisan peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin yang memiliki nilai spiritual tinggi dan menjadi pusat ziarah bagi masyarakat. Tradisi ziarah ini menjadi bagian dari identitas religius masyarakat Banten yang diwariskan lintas generasi (Amrulloh et al., 2022). Namun, dalam praktik pengelolaannya, masih terjadi kesenjangan antara pemerintah, pengelola masjid, dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) melaksanakan program revitalisasi kawasan sejak 2022 (Kompas, 2022). Tujuannya untuk menjaga kelestarian cagar budaya sekaligus memperbaiki tata ruang dan kenyamanan pengunjung. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan tersebut memunculkan resistensi dari sebagian pedagang lokal karena minimnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Beberapa pedagang menilai kebijakan relokasi tidak disertai jaminan kejelasan lokasi baru, bahkan dianggap mengancam mata pencaharian mereka (Radar Banten, 2023).

Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa dana pengelolaan masjid, terutama dari kotak amal dan sumbangan peziarah, tidak dikelola langsung oleh pemerintah, melainkan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Salah satu pedagang menjelaskan bahwa dana yang terkumpul “biasanya satu plastik besar dari uang peziarah tapi masyarakat tidak tahu

digunakan untuk apa” (Wawancara, 9 Oktober 2025). Ketertutupan informasi ini menimbulkan krisis kepercayaan antara masyarakat dan pengelola. Dalam teori *collaborative governance*, transparansi merupakan unsur utama dalam membangun kepercayaan. Tanpa kejelasan pengelolaan, kolaborasi akan cenderung timpang dan memunculkan spekulasi negatif di tingkat lokal.

Keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada intensitas dialog antar aktor, tetapi juga pada tingkat kepercayaan yang terbangun di antara mereka (*trust building*). Dalam konteks pengelolaan Masjid Agung Banten, yang merupakan warisan bersejarah peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin, persoalan kepercayaan ini menjadi kunci utama. Masjid tersebut bukan sekadar bangunan bersejarah, tetapi juga memiliki nilai spiritual tinggi dan menjadi pusat ziarah masyarakat Banten lintas generasi (Amrulloh et al., 2022). Tradisi ziarah itu sendiri telah membentuk identitas religius masyarakat yang kuat dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Masjid Agung Banten masih diwarnai ketidaksinkronan antaraktor yakni antara Pemerintah Provinsi Banten melalui Pemkot Serang dan pihak yayasan yang merupakan keturunan langsung dari Sultan Maulana Hasanuddin. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pihak, terdapat pembagian kewenangan yang telah disepakati melalui musyawarah: area dalam (khusus ziarah) dikelola oleh yayasan, sedangkan area luar ditangani oleh pemerintah. Meskipun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan adanya gap kepercayaan dan koordinasi.

Fenomena pungutan liar (*pungli*) di area penziarahan, misalnya, menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan mencoreng nilai sakralitas tempat tersebut. Praktik semacam ini mengindikasikan lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam kolaborasi yang seharusnya berbasis kepentingan publik. Di sisi lain, proyek renovasi besar pada tahun 2020 yang dilakukan sepenuhnya oleh Pemkot Serang tanpa keterlibatan signifikan dari yayasan juga memperlihatkan dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan, yang justru bertentangan dengan semangat *collaborative governance*.

Dalam perspektif teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008), kolaborasi yang ideal seharusnya dibangun di atas prinsip partisipasi setara, saling percaya, dan orientasi pada hasil bersama (*shared outcome*). Ketidakharmonisan antara pemerintah dan yayasan menunjukkan bahwa proses kolaborasi ini masih berada pada tahap awal, di mana *trust building* belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah cenderung menonjol dalam aspek struktural dan kebijakan, sementara yayasan mempertahankan otoritas kultural dan historisnya.

Konsistensi dan Peran Aktif dalam Kolaborasi

Pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen dalam pelestarian kawasan Banten Lama melalui sejumlah regulasi dan kebijakan. Revitalisasi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama (MSKBL) oleh Kementerian Kebudayaan pada tahun 2025 menandai upaya pelestarian berkelanjutan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga edukatif. Museum kini menjadi ruang interaktif untuk literasi budaya dan sejarah Kesultanan Banten. Program tersebut diintegrasikan dengan penataan situs bersejarah lain seperti Benteng Speelwijk dan Keraton Kaibon (Fadli, 2025).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten juga menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten 2018–2025 yang menetapkan kawasan Banten Lama sebagai destinasi strategis dengan kekhususan cagar budaya. Implementasi peraturan ini diperkuat dengan Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2011 dan Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2023 yang mengatur pengelolaan kawasan strategis dan pelestarian lingkungan. Dari sisi masyarakat, sebagian besar pedagang menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan ini, meskipun beberapa tetap berharap ada jaminan ekonomi yang lebih jelas agar keberlanjutan kolaborasi tidak timpang antara kepentingan pelestarian dan kesejahteraan warga.

Upaya pelestarian dari pihak yayasan, masyarakat, pemerintah yaitu sama sama dengan melakukan kolaborasi. Ada batas dari depan menara sampai dengan selokan itu dikelola oleh pemerintah kota serang, dan dari sekolan dekat menara sampai ke dalam yang biasa disebut tempat ziarah itu dikelola atau dilestarikan oleh pihak keluarga kesultanan. Ada pemisahan hasil dari mufakat antara pemerintah, warga, dan keluarga kesultanan. Pemerintah mengelola bagian depan kesultanan, seperti menjaga kelestarian pada kebersihan tempat, menyediakan tempat sampah diberbagai tempat, ketertiban dan dari segi keamanan ada security yang menjaga. Dari pihak kesultanan juga ada security yang menjaga, walau masing masing mengelola nya tetapi saling bekerjasama untuk melestarikan. Renovasi di adakan pada masjid pada tahun 2019 dari pemerintah yaitu dari pak Wahidin Halim, yang dimana ada visi misi untuk membangun Banten, biaya untuk pembangunan ditanggung oleh pajak.

Dalam wawancara Disparpora bahwa disparpora hanya mempunyai wewenang untuk bagian kampung Sukadiri atau yang disebut kampung wisata, sedangkan Banten lama dikelola oleh pihak provinsi, tetapi disparpora memberikan adanya pelatihan seperti pelatihan memandu jadi nanti pihak yayasan menjadi lebih tau cara memandu, ada juga pembinaan untuk monitoring melihat perkembangan nya seperti apa, disparpora hanya sekedar memberikan pelatihan untuk bentuk kolaborasi, dan bersifat konsisten tetapi bisa saja dicabut kolaborasi

tersebut jika ada hal hal tertentu seperti ada peraturan baru dari provinsi atau yang lainnya. Terkait revitalisasi yaitu hasil dari bantuan pihak provinsi yang saat ini masih mengelola dana yang dibanten lama adalah masuk ya kepada pihak yayasan. Dispapora melakukan adanya pelestarian dengan membantu promosi video pariwisata yang memasukkan dokumentasi Banten lama sebagai wisata sedangkan religi supaya menarik perhatian publik dan berujung ingin berkunjung.

Shared Understanding

Pemahaman bersama (*shared understanding*) merupakan tahap lanjut dalam kolaborasi yang menentukan arah dan tujuan kolektif. Pemerintah menilai Masjid Agung Banten sebagai aset kebudayaan dan simbol Islam Nusantara, sementara masyarakat memandangnya sebagai sumber ekonomi yang menopang kehidupan sehari-hari. Meski berbeda perspektif, keduanya memiliki visi yang sama dalam menjaga keberlangsungan kawasan (Reviana et al., 2025).

Salah satu pedagang yang telah lama berjualan di area masjid menyampaikan *“Saya sudah berjualan dari lama banget, dari awal pengantin baru sampai anak saya kelas 6 SD, dari jaman masjid ini masih sederhana dan belum sebagus ini”* (Wawancara, 9 Oktober 2025). Bagi masyarakat, pelestarian masjid yang baik akan meningkatkan jumlah pengunjung dan berdampak pada peningkatan pendapatan mereka. Dengan demikian, sinergi antara pelestarian sejarah dan kesejahteraan ekonomi menjadi tujuan bersama yang harus dijaga.

Namun, tantangan masih muncul pada praktik implementasi. Beberapa pedagang masih mengalami penggusuran sepihak ketika pejabat pemerintah berkunjung. Salah satu pedagang menyebutkan *“Kadang selalu diusir neng, kalo ada orang besar (pemerintah) kita selalu diusir-usir dan dibuangin dagangan kita padahal harusnya kan gapapa biar pemerintah tahu kalo ada kita yang ikut mencari rezeki di masjid ini”* (Wawancara, 9 Oktober 2025). Praktik ini menunjukkan bahwa pemahaman bersama belum sepenuhnya mengakar karena kebijakan lapangan belum berpihak pada keseimbangan antara aspek pelestarian dan hak ekonomi warga.

Dalam menjaga pelestarian juga antara masyarakat dengan pengurus masjid agung banten yaitu yayasan memiliki kesamaan pemahaman di mana mereka sama-sama menjaga dan melestarikan masjid agung banten dengan caranya masing-masing. Seperti yang dikatakan salah satu pengurus yayasan mengatakan *“walaupun terdapat batasan wilayah antara yang dikelola pemerintah dengan pihak keluarga kesultanan tapi tujuan akhir kami sama yaitu melestarikan masjid agung banten, seperti dari aspek kebersihan, keamanan dan kenyamanan untuk para tamu yang datang ke masjid agung”* (Wawancara, 27 Oktober 2025)

Namun dari hasil wawancara dengan Disparpora Kota Serang hanya ditemukan kolaborasi kecil antara pihak yayasan dan masyarakat dalam rangka melestarikan Masjid

Agung Banten. Kolaborasi tersebut tidak secara langsung merujuk ke pelestarian namun masih berkaitan salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan bagaimana cara memandu wisatawan dengan baik, agar wisatawan bisa revisit dan Masjid Agung Banten akan tetap dikunjungi. Seperti yang dijelaskan oleh bu Hani selaku ahli muda bidang Pariwisata Disparpora Kota Serang mengatakan *"Kita ada kolaborasi sedikit di tahun ini dengan yayasan itu adalah maktab kenaziran, itu kami mengajak mereka untuk pelatihan pemanduan, dengan adanya pelatihan pemanduan itu mungkin salah satu bentuk pelestarian ya jadi kan mereka jadi tahu cara memandu yang baik bagaimana, jadi informasi tentang masjid agung banten tersampaikan dengan baik ke wisatawan"* (Wawancara, 7 November 2025). Jadi walaupun hanya ada sedikit kolaborasi akan tetapi pemahaman antara pemerintah dengan pihak yayasan maupun masyarakat masih sama yaitu menjaga Masjid Agung Banten dengan caranya masing-masing.

Dampak dari Kolaborasi di Kawasan Masjid Agung Banten

Upaya revitalisasi kawasan Banten Lama sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010–2030, khususnya Pasal 7 ayat 11 yang menegaskan pentingnya pengembangan dan penataan wisata religi Banten Lama. Selain itu, kebijakan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam melindungi, mengembangkan, serta memanfaatkan warisan budaya sebagai bagian dari pelestarian identitas bangsa.



Gambar 1. Komparasi Sebelum Kawasan masjid Agung Banten Lama direvitalisasi.

Sumber: (Kelanaku, 2018).



Gambar 2. Komparasi Sesudah Kawasan masjid Agung Banten Lama direvitalisasi.

Sumber: (Peneliti, 2025).

Sebelum dilakukannya program revitalisasi oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2018, kawasan Banten Lama, khususnya di sekitar Masjid Agung Banten dan kompleks Keraton Kesultanan Banten memperlihatkan kondisi yang kurang tertata dan cenderung semrawut. Lingkungan situs yang seharusnya menjadi kawasan cagar budaya dan wisata religi tersebut didominasi oleh aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan menuju masjid dan di area pelataran utama. Aktivitas perdagangan yang tidak teratur menyebabkan kawasan terlihat padat, kumuh, dan tidak tertib, sehingga mengurangi kesakralan dan estetika kawasan bersejarah ini.

Setelah dilakukannya program revitalisasi kawasan Banten Lama oleh Pemerintah Provinsi Banten yang dimulai sejak tahun 2018, kondisi lingkungan di sekitar Masjid Agung Banten dan Keraton Kesultanan Banten mengalami perubahan signifikan. Penataan kawasan ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar, seperti pelebaran akses jalan, perbaikan trotoar, penyediaan lahan parkir terpadu, pembangunan ruang terbuka publik, serta renovasi area pelataran masjid agar lebih representatif bagi jamaah dan wisatawan. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap, meliputi Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, hingga Benteng Speelwijk (Lestari et al., 2021)

Revitalisasi kawasan Banten Lama membawa perubahan signifikan terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Lestari et al. (2021), revitalisasi meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan sebesar 34,6%, sementara faktor lain di luar

kebijakan berkontribusi sebesar 65,4%. Perbaikan infrastruktur dan tata ruang memperkuat fungsi kawasan sebagai pusat wisata religi sekaligus ruang edukatif sejarah Islam di Nusantara.

Selain peningkatan jumlah wisatawan, revitalisasi juga menumbuhkan aktivitas ekonomi lokal melalui relokasi dan penataan pedagang kaki lima ke zona yang lebih tertib. Dampak positif juga terlihat pada tumbuhnya kegiatan edukasi sejarah dan budaya yang diselenggarakan komunitas lokal serta lembaga pendidikan (Supriatna et al., 2022). Dengan demikian, kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian Masjid Agung Banten tidak hanya melestarikan nilai sejarah dan religius, tetapi juga memperkuat fungsi sosial dan ekonomi kawasan. Berikut pernyataan dari pedagang yang berjualan di sekitaran Banten Lama *“iya lumayan membantu perekonomian setelah adanya renovasi disekitaran sini, apalagi kalau abis lebaran bisa dapet satu juta lah sehari kalau misalkan rame”* (Wawancara, 9 Oktober 2025).

Selain menjadi tempat ziarah, kawasan Banten Lama kini juga difungsikan sebagai ruang edukatif yang memperkenalkan sejarah dan kebudayaan Islam di Banten kepada generasi muda. Sejumlah kegiatan seperti tur sejarah, wisata edukatif, dan kajian budaya mulai rutin diselenggarakan oleh komunitas lokal maupun lembaga pendidikan. Hal ini menjadikan kawasan tersebut lebih menarik bagi wisatawan religi dan pelajar/mahasiswa yang datang tidak hanya untuk berziarah, tetapi juga untuk belajar sejarah dan budaya lokal.

Berdasarkan penelitian Supriatna et al (2022) sebanyak 57,7% mengunjungi kawasan ini untuk wisata religi, sedangkan 26,9% datang untuk tujuan pembelajaran sejarah dan sosial budaya. Dengan demikian, revitalisasi kawasan Banten Lama tidak hanya memperbaiki kondisi fisik dan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga berhasil menghidupkan kembali fungsi sosial, ekonomi, pembelajaran dan kultural kawasan sebagai pusat peradaban Islam di Nusantara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian Masjid Agung Banten tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Berdasarkan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash, proses kolaborasi di kawasan Masjid Agung Banten masih berada pada tahap awal, ditandai oleh belum optimalnya komunikasi langsung dan terbatasnya pembangunan kepercayaan. Meskipun demikian, telah muncul kesadaran bersama untuk menjaga keberlanjutan fungsi religius dan historis masjid melalui kegiatan kolektif seperti kebersihan lingkungan, pelatihan pemandu wisata, serta penyediaan fasilitas bagi jamaah dan wisatawan. Untuk memperkuat

kolaborasi, diperlukan kejelasan peran antaraktor, mekanisme komunikasi yang transparan, dan forum bersama yang dapat menjembatani perbedaan kepentingan. Dengan tata kelola kolaboratif yang lebih kuat, Masjid Agung Banten berpotensi menjadi model pelestarian warisan budaya berbasis partisipasi masyarakat dan pemerintahan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2020). Collaborative governance dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(2), 112–127. <https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.748>
- Alif.id. (2021). *Masjid Agung Banten: Identitas komunitas yang memakmurkan*. <https://alif.id/read/susi-ivvaty/masjid-agung-banten-identitas-komunitas-yang-memakmurkan-b220154>
- Amrulloh, A., Jumiaty, I. E., & Yulianti, R. (2022). Collaborative governance dalam pengelolaan kawasan strategis daerah Banten Lama. *JIPAGS: Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i2.12446>
- Anisah, H., Nurhafifah, I., Fitriani, I., Utari, E., & Rifqiawati, I. (2023). Banten Lama sebagai daya tarik wisata bersejarah di Kabupaten Serang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 67–75. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4690>
- Annisarizki, & Sucahya, M. (2018). Manajemen wisata religius Kesultanan Banten (Bauran komunikasi pemasaran dalam meningkatkan jumlah wisatawan). *Nyimak: Journal of Communication*, 2(2), 187–205. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v2i2.928>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Antara News. (2019, May 23). *Kemendikbud tetapkan Banten Lama jadi warisan cagar budaya nasional*. Antara News.
- Ariesmansyah, A., Busthomi Ariffin, R. H., & Respati, L. A. (2023). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal EL-RIYASAH*, 14(1), 58. <https://doi.org/10.24014/jel.v14i1.25060>
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi collaborative governance dalam pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196–210.
- Cahyani, N. P. T., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Collaborative governance dalam menanggulangi kekerasan perempuan dan anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 72–84. <https://doi.org/10.61292/eljbn.164>
- Daniswari, D. (2022, May 5). *Sejarah Singkat Masjid Agung Banten, ciri-ciri, makam, dan peninggalan*.
- Fadillah, A. (2023). Dinamika pelestarian situs Banten Lama: Antara modernisasi dan konservasi sejarah. *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 15(2), 101–115.
- Fadillah, M. A. (2022). Pelestarian situs Banten Lama: Perspektif arkeologi publik. *Kritis*, 11, 64–80.

- Gunawan, A., & Ma'ruf Farid, M. (2020). Collaborative governance dalam upaya merespon pengaduan masyarakat terkait lalu lintas (Studi pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Journal of Public Sector Innovation*, 1–10. https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZmQ4NGZiNjBkN2NiOTdjYjBkM2U2MTdiNzcxNzcwM2QxY2FhNTVlMQ==.pdf
- Hendri. (2025, August 27). *Masjid Agung Banten: Dari pusat dakwah hingga ikon ziarah*.
- Iqbal, M., & Hikmawan, M. D. (2023). Collaborative governance dalam upaya konservasi hutan mangrove di Kota Serang tahun 2017–2022. *JISI POL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3).
- Irvansetiawan. (2018). *Masjid Agung Banten Lama*. Kemendikbud. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/masjid-agung-banten-lama/>
- Jessika, Sarah, S., & Sujana, A. M. (2025). Tradisi ziarah di Banten. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(3), 220–229.
- Kemdikbud. (2024). *Masjid Agung Banten sebagai cagar budaya*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>
- Kompas. (2024, March 18). *Sejarah Masjid Agung Banten, masjid berusia 5 abad peninggalan Kesultanan Banten*. Kompas.id.
- Lestari, A. A., Sururi, A., & Berthanilla, R. (2021). Pengaruh revitalisasi kawasan Banten Lama terhadap tingkat kunjungan wisatawan kawasan wisata religi Keraton Kesultanan Banten di Kecamatan Kasemen Kota Serang. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2242>
- Lukito, R., & Syahid, A. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pelestarian masjid kuno di Banten. *Jurnal Konservasi Budaya*, 8(1), 45–59.
- Maulana, M. P. W. A. A., & Ariesmansyah, A. (2024). Analisis collaborative governance di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2008), 4986–5004.
- Menteri Budaya resmikan revitalisasi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. (n.d.). <https://share.google/xVU7VqbUleFyH1nRP>
- Pakhudin, A., & Stiawati, T. (2019). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah Banten Lama Kota Serang. *Sumber*, 4(16), 11.
- Pelestarian kawasan bersejarah Banten Lama jadi prioritas penataan wilayah – Jendela Nusantara. (n.d.). <https://share.google/2YT9WqzGi0czbDzND>
- Peninggalan. (2022). *Sejarah Singkat Masjid Agung Banten: Ciri-ciri, makam, dan peninggalan*. KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2022/05/05/172744178/sejarah-singkat-masjid-agung-banten-ciri-ciri-makam-dan-peninggalan?page=all>
- PERDA. (n.d.). <https://share.google/M2SFIVKgfMOsuvdyi>
- Raharjo, W. B., & Hendra, A. (2024). Collaborative governance dalam pengembangan wisata budaya Keraton Kacirebonan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation, IPDN).
- Religi. (2025). *Masjid Agung Banten: Dari pusat dakwah hingga ikon ziarah*. Surau.co. <https://www.surau.co/2025/08/31080/masjid-agung-banten-dari-pusat-dakwah-hingga-ikon-ziarah>

- Reviana, M. N., Jumiati, I. E., Salsabilla, D., & Prasetyo, A. (2025). Model kebijakan mixed scanning dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Banten yang berkelanjutan. *JAKD: Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 4(1), 1–23.
- Revitalisasi wisata sejarah Banten Lama, Rp 220 milyar disiapkan. (n.d.). *Tempo.co*. <https://share.google/mIUqqpEVXu8wWlEF1>
- Sholeh, K., & Aulia, D. (2020). Konflik konservasi cagar budaya: Strategi kepemimpinan gubernur dalam pelestarian cagar budaya kawasan Kesultanan Banten Lama. *Prosiding Simposium Nasional Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0*, 86–106.
- Supriatna, E., Widjojoko, A., Sutarjo, A., Wardana, D., & Romdoni, D. I. (2022). Dampak revitalisasi kawasan Banten Lama terhadap kunjungan wisatawan mahasiswa/pelajar sebagai sumber belajar IPS di SD. *Jurnal Ilmiah*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Syahid, A., Maddeppungeng, A., & Subekti, Y. (2024). Konservasi situs keagamaan di Banten: Tantangan dan peluang. *Jurnal Warisan Nusantara*, 12(1), 77–93.
- Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58–69.
- Universitas Kristen Satya Wacana. (2022). *Revitalisasi kawasan bersejarah berbasis partisipasi masyarakat*. *Jurnal Kritis*, 6(1), 45–56.